

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan partai politik sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi, tanpa adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan baik dan sebagaimana mestinya. Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang menerapkan demokrasi sebagai sistem untuk mengelola pemerintahan dan kehidupan bernegaranya. Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok terorganisir yang anggotan-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan berbuat kedudukan politik dengan cara institusional untuk melaksanakan programnya.<sup>1</sup>

Partai politik pada dasarnya adalah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai bagian dari suprastruktur politik, partai berperan membalance-kan dan mengontrol kinerja pemerintah sehingga terjadi keseimbangan dalam berjalanya sistem politik. Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis atau kontrol terhadap pemerintah. Pertama sikap kritis dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang menduduki lembaga

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, Dasar –Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 403.

legislatif (DPR/DPRD). Kedua, partai politik dapat menyampaikan sikap krisisnya melalui jalur non perlemen semisal diskusi dan debat publik.<sup>2</sup> Pentingnya kedudukan partai politik dalam mendukung sistem pemerintahan yang demokrasi maka perlu rasanya bagi kita untuk melihat bagaimana perkembangan partai politik itu sendiri termasuk titik awal perkembangan partai politik di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan partai politik terjadi melalui sebuah proses yang panjang, melalalui proses inilah sebuah partai politik tumbuh dan berkembang menjadi sebuah partai yang mampan atau malahan sebaliknya partai politik yang tidak mampu bertahan melewati fase-fase ini berakhir dengan kemunduran bahkan kematian. Huntington mengungkapkan bahwa partai politik tumbuh dan berkembang melalui setidaknya empat tahapan penting,yakni faksionalisme,polarisasi,ekspansi dan institusionalisasi.<sup>3</sup> Berdasarkan keempat tahapan perkembangan partai politik menurut Huntington ini memosisikan pelembagaan partai politik sebagai tingkatan tertinggi dari fase-fase pertumbuhan dan perkembangan sebuah partai politik. Hal inilah yang menjadikan pentingnya tingkat pelembagaan bagi sebuah partai politik demi upaya mendukung tercapainya sistem politik yang demokratis.

---

<sup>2</sup> Fimanzah,mengelola partai politik; komunikasi dan positioning ideology politik di era demokrasi,yayasan obor Indonesia,Jakarta,2007, hlm 73-74.

<sup>3</sup> Samuel P Huntington ,partai politik; teori dan praktik di Indonesia ,institute for democracy dan welfarism,Yogyakarta,2011, hlm, 65.

Huntington sendiri mendefinisikan pelembagaan sebagai sebuah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas.<sup>4</sup> Lebih lanjut pelembagaan partai politik yang dimaksud adalah proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistimatik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi.<sup>5</sup> Secara umum pelembagaan partai politik merujuk pada sejauh mana sebuah partai politik mampu mencapai kematangan secara internal dan eksternal sebagai sebuah organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga pada dasarnya tingkat pelembagaan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama partai politik yang baik dalam rangka mendukung demokrasi dan menjamin partai mampu bertahan dalam bersaing politik di masa depan.

Sebuah partai politik agar tetap bertahan dalam persaingan politik kontemporer harusnya memiliki tingkat pelembagaan partai yang baik, karena dengan pelembagaan ini partai politik memiliki orientasi hasil jangka panjang. Akan tetapi untuk mencapai tingkat pelembagaan yang baik bukanlah hal yang mudah dan masih menjadi tantangan yang sulit bagi partai-partai politik di Indonesia. Sebab fenomena menunjukkan bahwa partai politik saat ini lebih berfokus dalam membangun strategi politik jangka pendek demi mencapai

---

<sup>4</sup> Samuel P. Huntington, *political order in changing societies*, yale university press, London, 1973, hlm, 12

<sup>5</sup> Teguh Irmansyah, Regulasi partai politik dalam mewujudkan peran dan fungsi kelembagaan partai politik, jurnal *rechtsviinding* vol 1 no 3 desember 2012 hlm 380.

kemenangan saat pemilu, ketimbang berfokus memperbaiki kualitas pelembagan partai.

Realita seperti ini menjadikan kebanyakan partai politik hanya sebagai organisasi musiman yang hanya aktif saat menjelang pemilihan saja, lebih dari itu masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh partai apakah partai benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi atau tidak. Sehingga pelembagaan sebuah partai politik kian menjadi penting dikala pesatnya pertumbuhan partai politik di Indonesia pasca era reformasi.

Perkembangan partai politik di Indonesia sangat pesat pasca bergulirnya reformasi, ini dikarenakan suasana iklim politik yang semakin demokratis bersama dengan diberlakukannya sistem multipartai. Sebelumnya pada masa orde baru keberadaan dan jumlah partai politik dibatasi dengan adanya kebijakan fusi partai oleh presiden soeharto. Sehingga sejak diberlakukannya system multipartai di era reformasi memicu munculnya parpol-parpoll baru pada kala itu. Kemunculan partai-partai politik baru ini nyata terlihat pada saat pemilu pertama di era reformasi, yaitu pemilu yang dilaksanakan tahun 1999.

Pasca diimplementasikannya sistem multi partai ini di Indonesia ternyata memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berdemokrasi secara langsung. Pada dasarnya keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi penting dalam memainkan peran sentral dalam menjaga pluralism ekspresi politik serta menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Namun

dampak penerapan sistem multipartai ini bias diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang.

Disatu sisi, sistem multi partai berdampak positif bagi Indonesia karena mampu mengakomodasi berbagai ideologi dan paham dari berbagai golongan mengingat Indonesia adalah negara plural dengan keanekaragaman warisan budaya bangsa. Pada kondisi ini partai politik bermanfaat sebagai wadah dalam menampung bangsa. Pada kondisi ini partai politik bermanfaat sebagai wadah dalam menampung berbagai ideologi serta paham politik yang demikian pula banyaknya pada semakin tingginya tingkat persaingan antar partai politik tersebut dalam merebut kekuasaan yang dalam politik praktis terwujud dalam kontekstasi pemilihan umum. Keadaan ini mendorong munculnya persaingan-persaingan yang tidak sehat di antara partai politik dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Pada sisi lain kehadiran banyak partai memunculkan persaingan antar partai bukanlah satu-satunya rintangan yang dihadapi partai politik pasca reformasi. Terdapat masalah lain seperti munculnya spekulasi dalam masyarakat bahwa partai tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama fungsi menghimpun dan memperjuangkan aspirasi publik. Selain itu banyaknya partai politik yang terlibat korupsi berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Banyaknya tantangan yang dihadapi ini menuntut partai politik harus bertahan dengan menerapkan berbagai strategi dan promosi agar tetap memperoleh tempat dihati masyarakat. Bagi partai politik yang

mampu beradaptasi dengan baik maka akan terus tumbuh dan berkembang akan tetapi sebaliknya partai yang tidak mampu mengimbangi perkembangan politik pada akhirnya hilang terseleksi persaingan politik yang semakin ketat.

Salah satu partai politik yang masih terus bertahan dan berkembang hingga saat ini adalah partai demokrasi Indonesia perjuang (PDI-P). Partai PDI-P ini tergolong partai tua yang bersaing di peta politik Indonesia. Partai ini merupakan partai politik yang memiliki tali kesejaraan dengan partai politik pada masa orde lama. PDI-P adalah pecahan dari partai demokrasi Indonesia(PDI). Partai PDI-P ini terus berkembang dan semakin populer dimata publik. Perkembangan serta popularitas yang di capai PDI-P bisa diliat dari hasil Pemilu legislatif tahun 2009,2014 dan 2019. Partai PDI-P senantiasa mengalami peningkatan perolehan kursi legislatif . berikut adalah perolehan kursi partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009, 2014 dan 2019 :

Tabel 1.1

Hasil pileg tahun 2009,2014 dan 2019 untuk DPRD NTT<sup>6</sup>

No	Partai politik	Tahun 2009	Tahun 2014	Tahun 2019
1	Golkar	9 kursi	11 kursi	10 kursi
2	PDI-P	8 kursi	10 kursi	10 kursi
3	Nasdem	-	8 kursi	9 kursi
4	Demokrat	9 kursi	8 kursi	4 kursi
5	Gerindra	7 kursi	9 kursi	6 kursi
6	Hanura	5 kursi	5 kursi	5 kursi
7	PKB	-	5 kursi	7 kursi
8	PAN	-	5 kursi	6 kursi
9	PKPI	-	2 kursi	-
10	PKS	1 kursi	2 kursi	-
11	PPP	1 kursi	-	1 kursi
12	PSI	-	-	1 kursi
13	PDS	3 kursi	-	-
14	Peloppor	1 kursi	-	-
15	PPRN	1 kursi	-	-
16	PDK	2 kursi	-	-
17	PRN	1 kursi	-	-
18	PPDI	1 kursi	-	-
19	PKPB	3 kursi	-	-

---

<sup>6</sup> KPU Provinsi NTT tahun 2022

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam tiga periode pemilu terakhir PDIP selalu menempati posisi satu atau dua secara bergantian. PDIP di NTT boleh dikatakan sebagai partai besar, pada pemilu 2009, 2014 dan 2019 PDIP sebagai pemenang pemilu di NTT. Kini kompetisi antar partai semakin tinggi. Kompetisi yang dihadapi PDIP saja berkompetisi dengan partai peserta pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya tetapi berkompetisi pula dengan partai politik baru. Menghadapi situasi kompetitif seperti PDIP sebagai pemenang pemilu wajib siaga menghadapi kontestasi pada pemilu 2024 melalui pembenaan atau pelembagaan partai.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Indopol Survei and Consulting melakukan survei yang berkaitan dengan elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2024. Tercatat di urutan pertama ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan angka 18,94 persen disusul Partai Gerindra 9,44 persen, dan Golkar 6,34 persen. Di peringkat keempat ada Partai Demokrat 5,04 persen, lalu Partai Keadilan Sejahtera 4,55 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 3,98 persen dan Partai NasDem 3,41 persen. Beberapa partai baru mengisi 3,33 persen suara kemudian Partai Amanat Nasional di angka 1,30 persen. Tingginya elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal ini untuk pemilu 2024 berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan seseorang pemimpin merupakan kunci maju atau mundurnya suatu bangsa, nasib dan masa depan Bangsa ditentukan sejauh mana kecakapan seorang pemimpin.

Berbicara mengenai pelebagaan partai politik terdapat dua ahli yang berfokus membahas pelebagaan partai politik yakni Vicky Radall dan Lars Svasand.<sup>7</sup> Kedua orang ahli ini berusaha melihat pelebagaan partai politik dari dua aspek, pertama yaitu interna-eksternal dan kedua aspek struktural-kultural. Perpaduan kedua aspek ini nantinya muncul empat dimensi yang digunakan sebagai indikator untuk membantu melihat bagaimana pelebagaan sebuah partai politik. Keempat dimensi hasil perpaduan kedua aspek tersebut pelebagaan tersebut adalah systemness, decisional, autonomy, value infusion, dan reification (derajat kesisteman, otonomi pengambilan keputusan, derajat identitas nilai, dan reifikasi)

Untuk penelitian kali ini penulis berusaha menggambarkan kemenangan yang diperoleh sebuah partai politik merupakan faktor dari tingkat pelebagaan partai yang sudah baik atau tidak. Sebab dalam teori yang sudah ada yang sebelumnya dikatakan bahwa kemenangan partai politik di wilayah electoral tidak menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan pelebagaan partai tersebut. Untuk itu peneliti melihat lebih jauh bagaimana pelebagaan yang dimiliki partai PDI-P menjadi sebuah penelitian dengan judul : Pelebagaan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di NTT menghadapi kontestasi elektoral pemilu 2024.

---

<sup>7</sup> Wawan Kuswandro, Pelebagaan Partai Politik, vol 8 januari no 1 Tahun 2002, Jurnal Party Politics

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi rumusan masalah dalam peneliti ini adalah: Bagaimanakah Pelembagaan Partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P) Di Provinsi NTT Menghadapi Kontestasi Elektoral Pemilu 2024 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan pelembagaan partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Di NTT menghadapi kontestasi elektoral pemilu 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini mampu menjadi sebuah pembaharuan serta variasi secara akademik pada prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKA Widya Mandira dengan topik yang lebih menarik yaitu pelambagaan partai politik.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi baik secara eksternal maupun internal partai politik agar lebih membenahi dalam rangka mewujudkan sebuah partai politik yang terlembaga secara struktural dan kultur. Hal ini dikarenakan pelembagaan partai politik adalah hal yang sangat penting demi mencapai stabilitas dan menjaga ekstensi partai politik di masa depan.

